



Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 – 2024

Alya Nurhasani¹, Ade Budi Setiawan², Dea Julfani^{3*}, Firda Fauziah⁴,
Hilman Ariyansyah⁵, Marisa Talia Putri⁶

¹⁻⁶ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda, Indonesia

*Penulis Korespondensi: deajulfani312@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the East Java Provincial Government based on the Budget Realization Report (LRA) for the 2022–2024 period. This study is important to assess the effectiveness of revenue achievement and the efficiency of regional expenditure management. The research method used is quantitative descriptive with secondary data in the form of Budget Realization Reports obtained through documentation techniques. Data analysis was performed using financial ratio analysis, namely effectiveness and efficiency ratios. The results show that the revenue performance of the East Java Provincial Government is in the highly effective category, as reflected in the realization of revenue that was able to reach and even exceed the budget target. However, regional expenditure performance is still considered inefficient because the realization of expenditure is close to the set budget. The conclusion of this study shows that even though revenue optimization has been achieved, the local government still needs to improve expenditure control so that regional financial management becomes more efficient in the future.*

Keywords: *Budget Realization Report; Effectiveness; Efficiency; Provincial Government; Regional Financial Performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2022–2024. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas pencapaian pendapatan dan efisiensi pengelolaan belanja daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada pada kategori sangat efektif, yang tercermin dari realisasi pendapatan yang mampu mencapai bahkan melampaui target anggaran. Namun demikian, kinerja belanja daerah masih tergolong kurang efisien karena realisasi belanja mendekati anggaran yang ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun optimalisasi pendapatan telah tercapai, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pengendalian belanja agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien di masa mendatang.

Kata kunci: Efektivitas; Efisiensi; Kinerja Keuangan Daerah; Laporan Realisasi Anggaran; Pemerintah Provinsi

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah, secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah wajib dilakukan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengutamakan prinsip efisiensi, penghematan biaya, keberhasilan tujuan, dan keterbukaan. Hal ini bertujuan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai
Naskah Masuk: 14 November 2025; Revisi: 17 Desember 2025; Diterima: 27 Januari 2026; Tersedia: 29 Januari 2026

tantangan, terutama terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Tidak sedikit pemerintah daerah yang mampu menyerap anggaran dalam jumlah besar, namun belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa anggaran tersebut memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal daerah telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah (Neti Oktavianty, Gita Desyana, 2024). Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Alfallah et al., 2022).

Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan pemerintah daerah yang memaparkan informasi terkait dengan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama kurun waktu tertentu. Informasi yang disajikan dalam LRA dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan serta mengendalikan belanja sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan (Amanda, 2021). Oleh karena itu, analisis LRA dinilai efektif dalam memberikan gambaran kinerja keuangan daerah secara menyeluruh, khususnya dalam aspek pengelolaan pendapatan dan belanja daerah (Fitria Syaifanur, 2022).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah umumnya dilakukan melalui analisis rasio keuangan. Beberapa rasio yang sering digunakan antara lain rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan keserasian belanja. Rasio-rasio tersebut mampu menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan yang dimiliki serta mengelola anggaran secara tepat. Peneliti Alhabsi & Hajah (2023) menyatakan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi merupakan alat yang tepat untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dan mengelola belanja daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Fitri et al. (2025) menekankan bahwa penerapan konsep *value for money* melalui analisis LRA mampu menunjukkan sejauh mana anggaran daerah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam penelitian ini, penilaian kinerja keuangan difokuskan pada rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi belanja, karena kedua rasio tersebut secara langsung

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dan mengendalikan belanja sebagaimana tercermin dalam LRA.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam. Peneliti Lumaku & Nindiasari (2023) menemukan bahwa terdapat daerah yang memiliki tingkat efektivitas pendapatan yang tinggi, namun belum diimbangi dengan efisiensi belanja yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti Sabono (2024) yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat mengindikasikan lemahnya pengendalian anggaran pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi yang besar terhadap perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Dinamika realisasi APBD Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal daerah. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022–2024 yang disajikan pada Tabel 1. menunjukkan adanya perubahan dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal daerah terhadap dinamika kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun realisasi pendapatan daerah cenderung stabil, masih terdapat tantangan dalam pengendalian belanja dan optimalisasi kemandirian fiskal daerah (Ratu & Adityaputra, 2025).

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur 2022-2024.

Tahun	Provinsi Jawa Timur	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	Rp1.137.851.300.000	Rp1.200.873.860.000
2023	Rp1.228.777.530.000	Rp1.286.185.030.000
2024	Rp1.364.470.160.000	Rp1.440.462.070.000

Sumber: Portal Data SIKD – Kemenkeu.

Selanjutnya, data realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Timur tahun 2022–2024 yang ditampilkan pada Tabel 2. menunjukkan adanya perbedaan antara anggaran yang Direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Perbedaan ini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya terkait efektivitas pencapaian pendapatan dan efisiensi pelaksanaan belanja daerah. Selisih antara anggaran dan realisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan secara optimal dan berkelanjutan (Ratu & Adityaputra, 2025).

Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur 2022-2024.

Tahun	Provinsi Jawa Timur	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	Rp1.190.943.230.000	Rp1.187.937.740.000
2023	Rp1.184.137.770.000	Rp1.193.214.230.000
2024	Rp1.368.607.220.000	Rp1.365.434.530.000

Sumber: Portal Data SIKD – Kemenkeu.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis LRA, sebagian besar penelitian tersebut masih dilakukan pada periode dan objek yang berbeda. Selain itu, penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data LRA pada periode terbaru, yaitu tahun 2022–2024, masih terbatas. Padahal, periode tersebut merupakan fase penting dalam pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah pasca berbagai dinamika ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada periode dan objek yang lebih terkini.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis Laporan Realisasi Anggaran menjadi penting untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Periode tahun 2022–2024 merupakan fase yang relevan untuk dianalisis karena mencerminkan upaya pemulihan dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode tertentu dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan anggaran yang lebih efektif di masa mendatang (Ni'am et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran guna menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selama periode tersebut sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban atas pengurusan seluruh sumber daya ekonomi dalam kurun waktu satu periode anggaran. Laporan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas pemerintah daerah yang berguna bagi berbagai pihak terkait sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Amanda, 2021). Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berpedoman pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini ditegaskan oleh Neti Oktaviany & Gita Desyana (2024) yang menyatakan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Realiasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu bagian utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran (Amanda, 2021). Melalui laporan ini, tingkat pencapaian pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah dapat diketahui secara jelas. Informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Selain itu, LRA juga berperan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran serta dasar dalam penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ratu & Adityaputra, (2025) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal. Salah satu alat yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan. Menurut Amanda, (2021), analisis rasio keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendapatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lumaku & Nindiasari, 2023). Rasio efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah karena mencerminkan ketepatan perencanaan anggaran serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mampu mencapai bahkan melampaui target yang

ditetapkan, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan (Ratu & Adityaputra, 2025).

Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk menilai rasio efektivitas keuangan daerah.

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendapatan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi dan kondisi eksternal.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya keuangan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Alfallah et al., 2022). Rasio efisiensi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan yang tersedia. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja keuangan daerah karena menunjukkan penggunaan anggaran yang lebih hemat, terukur, dan tidak bersifat pemborosan. Namun demikian, efektivitas pendapatan yang tinggi tidak selalu diikuti dengan efisiensi belanja yang optimal, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan berorientasi pada hasil.

Kriteria penilaian rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa belanja daerah relatif lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga berpotensi menimbulkan

ketidakseimbangan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan pengendalian belanja agar tercipta pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan (Ratu & Adityaputra, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menguji hipotesis berdasarkan analisis data keuangan. Objek yang dikaji adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2022–2024. Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 – 2024 dengan menghitung rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur dengan aplikasi Excel. Tahapan analisis meliputi pemeriksaan laporan keuangan, penghitungan rasio, perbandingan temuan, serta penilaian akhir untuk menyimpulkan kondisi keuangan Provinsi Jawa Timur. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder melalui teknik dokumentasi, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan bersifat *time series* atau runtun waktu, dengan periode pelaporan dari tahun 2022 hingga 2024.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas diukur dengan membandingkan anggaran dan realisasi pendapatan. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi diukur dengan membandingkan anggaran dan realisasi belanja. Rumus untuk rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses berkelanjutan dan terstruktur untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai rencana, kebijakan, sasaran, serta tugas yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian setiap indikator kinerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai

efektivitas pencapaian tujuan (Alhabsi, 2023). Untuk itu, beberapa rasio keuangan diterapkan sebagai alat ukur:

Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas yang dijelaskan di atas didapatkan hasil efektivitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas Provinsi Jawa Timur.

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2022	Rp 1.137.851.300.000	Rp 1.190.943.230.000	104.67%	Sangat Efektif
2023	Rp 1.228.777.530.000	Rp 1.184.137.770.000	96.37%	Efektif
2024	Rp 1.364.470.160.000	Rp 1.368.607.220.000	100.3%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 5 Perkembangan rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2022 – 2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 8.3% yaitu dari 104.67% menjadi 96.37%. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 3.93%, yaitu dari 96.37% menjadi 100.30%. Hasil pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi dengan fokus rasio efektivitas pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 – 2024 rata-rata 100.45% yang artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikatakan sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan target. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan perolehan realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Ini juga mengartikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dalam menentukan target anggaran, serta mampu teralisasinya pendapatan yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi yang dijelaskan di atas didapatkan hasil efisiensi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Provinsi Jawa Timur.

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2022	Rp 1.200.873.860.000	Rp 1.187.937.749.000	98.92%	Kurang Efisien
2023	Rp 1.286.185.030.000	Rp 1.193.214.230.000	92.77%	Kurang Efisien
2024	Rp 1.440.462.070.000	Rp 1.365.434.530.000	94.79%	Kurang Efisien

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 6 Perkembangan rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2022 – 2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 6.15% yaitu dari 98.92% menjadi 92,77%. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 2.02%, yaitu dari 92.77% menjadi 94.79%. Hasil pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi dengan fokus rasio efisiensi belanja Provinsi Jawa Timur tahun 2022 – 2024 rata-rata 95.39% yang artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikatakan kurang efisien dalam merealisasikan belanja dibandingkan target. Hal ini menjadi peringatan penting untuk mengevaluasi kembali struktur biaya standar, metode pengadaan, dan produktivitas dalam pelaksanaan program, agar bisa mencapai hasil yang sama dengan anggaran yang lebih rendah, atau hasil yang lebih banyak dengan anggaran yang setara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode 2022 - 2024 melalui analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan daerah berada pada tingkat sangat efektif, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan serta menetapkan target anggaran secara realistis. Namun, kinerja belanja daerah masih menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah karena realisasi belanja hampir sepenuhnya menyerap anggaran yang tersedia, sehingga efektivitas pengendalian belanja belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan bukti empiris mengenai kinerja keuangan daerah berbasis LRA yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan anggaran yang lebih baik. Adapun keterbatasan penelitian ini mencakup terbatasnya indikator kinerja yang digunakan serta jangka waktu penelitian yang relatif singkat, sehingga penelitian mendatang disarankan untuk menambahkan variabel analisis, memperpanjang periode pengamatan, dan mengintegrasikan pendekatan kualitatif agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alfallah, D., Hernandi, S., Deviyanti, D. R., Iyhg, W., Sari, R., Mulawarman, U., & History, A. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah*, 7(1).
- Alhabsi, R. H. (2023). *Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019–2021* [Skripsi/tesis tidak dipublikasikan].

- Amanda, R. (2021). Analisis laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2017–2020. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 52–62.
- Fitri, F., Kamela, H., & Mulawarman, U. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2019–2023. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 69–75. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5327>
- Fitria Syaifanur, M. S. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan BLUD. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 252–258. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.21153>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan*. Badan Pemeriksa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Data APBD murni/perubahan: Realisasi APBD tahunan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2022&provinsi=13&pemda=-->
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Data APBD murni/perubahan: Realisasi APBD tahunan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=13&pemda=-->
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Data APBD murni/perubahan: Realisasi APBD tahunan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2024&provinsi=13&pemda=-->
- Lumaku, A. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis rasio keuangan pada laporan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2017–2021 (Distribusi Dana Keistimewaan DIY). *National Conference on Accounting and Finance*, 5, 207–211. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art24>
- Neti Oktavianty, G., Desyana, G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan konsep value for money. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 1–7.
- Ni'am, Z. B., Jaladri, C. M., & Ulfa, V. M. (2025). Analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 9(2), 73–80. <https://doi.org/10.51544/jma.v9i2.5632>
- Ratu, V. M., & Adityaputra, S. A. (2025). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor tahun 2019–2023. *Media Jurnal Akuntansi*, 19(2). <https://doi.org/10.33373/mja.v19i2.8668>
- Sabono, H. Y. (2024). Analisis laporan realisasi anggaran dalam mengukur kinerja keuangan desa. *Jurnal Studi Riset*, 2(1), 326–336. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.2647>